

Format DIK

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025

PPID Pelaksana : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pegawai ASN dan THL (by name by address)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data individu	Menjaga kerahasiaan data individu	Selama berlaku
2.	Data KP4 (by name by address)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan data individu	Menjaga kerahasiaan data individu	Selama berlaku
4.	Data Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (by name by address)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan	Penyalahgunaan data individu	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA sehingga data By Name By Address	Selama berlaku

		kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)		tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan korban	
5.	Data Pelapor dan saksi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (by name by addres)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)	Penyalahgunaan data individu	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA sehingga data By Name By Address tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan korban	Selama berlaku
6.	Data Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (by name by addres)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-undang Nomor 2 Tahun	Pe nyalahgunaan data individu	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2019	Selama berlaku

		2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)		tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA sehingga data By Name By Address tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan untuk menjaga privasi dan kerahasiaan korban	
7.	Database Program Bangga Kencana & Program Percepatan Penurunan Stunting yang mencakup data (by name by address)	a. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan data individu	Menjaga kerahasiaan data individu	Selama berlaku
8.	Kode Akses Elektronik	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga Keamanan Komputer	Selama berlaku

9.	Data Keluarga, Data Individu Sistem Informasi Keluarga (by name by address)	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Data Transaksi Elektronik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan	Penyalahgunaan data individu	Menjaga kerahasiaan data individu	Selama berlaku
10.	Data Radalgram Keuangan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengungkap data program, keuangan serta logistic yang masih berjalan	Melindungi data program, keuangan serta logistic yang masih berjalan	Selama berlaku
11.	Data keluarga resiko stunting (by name by address)	a. UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistic b. UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik c. PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik d. Peraturan presiden nomor 95	Penyalahgunaan data individu	Sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur dan menjaga kerahasiaan data individu	Selama berlaku

			tahun 2018 tentang system pemerintahan berbasis elektronik e. Peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia f. Peraturan Menteri komunikasi dan informasi nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik			
12.	Data pmutakhiran keluarga Indonesia (by name by address)		a. UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistic b. UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik c. PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik d. Peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang system pemerintahan berbasis elektronik e. Peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia	Penyalahgunaan data individu	Sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur dan menjaga kerahasiaan data individu	Selama berlaku

			f. Peraturan Menteri komunikasi dan informasi nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik			
13.	Data verifikasi dan validasi KRS (by name by address)		a. UU nomor 16 tahun 1997 tentang statistic b. UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik c. PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan system dan transaksi elektronik d. Peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang system pemerintahan berbasis elektronik e. Peraturan presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia f. Peraturan Menteri komunikasi dan informasi nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam system elektronik	Penyalahgunaan data individu	Sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur dan menjaga kerahasiaan data individu	Selama berlaku

Atasan PPID Pelaksana
Kepala Dinas



Chairur Rozikin, S.Sos, MM
NIP. 197004071992031005

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PENAJAM
 PASER UTARA TAHUN 2025

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai dan Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan /Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	Profil Dinas	Tempat dan Kedudukan	Bidang Sekertariat	Tahun 2024	Dokumen	Selama Berlaku	Media Elektronik
2	Visi Misi Dinas	maksud dan tujuan dinas	Bidang Sekertariat	Tahun 2025	Dokumen	Selama Berlaku	webiste
3	Profil Lengkap Pimpinan	Memuat informasi latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan Kepala Dinas	Bidang Sekertariat	Tahun 2025	Dokumen	Selama Berlaku	webiste
4	Survey Kepuasan Masyarakat 2025	Memberikan Gambaran Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil Pengukuran atas Pendapat masyarakat terhadap Mutu dan Kualitas Pelayanan Administrasi yang telah diberikan oleh Dinas	Bidang Sekertariat	Tahun 2025	Dokumen	Selama Berlaku	website
5	LHKPN	LHKPN memuat laporan harta kekayaan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala bidang dan Bendahara DDP3AP2KB	Bidang Sekertariat	Tahun 2023 dan 2024	Dokumen	Selama Berlaku	website
6	RKA dan DPA	Ringkasan RKA dan DPA	Bidang Sekertariat	Tahun 2025	Dokumen	Selama Berlaku	website, Instagram
7	SK PPK dan PPTK	Memuat informasi penanggungjawab kegiatan dan anggaran	Bidang Sekertariat	Tahun 2025	Dokumen	Selama Berlaku	website
8	Laporan Keuangan	memuat LRA, CALK, NERACA dan daftar aset dan investasi	Bidang Sekertariat	Tahun 2024	Dokumen	Selama Berlaku	website
9	Rekapitulasi keluarga Beresiko Stunting	Memuat informasi jumlah keluarga beresiko stunting	KBK3	Tahun 2024	Dokumen	Selama Berlaku	website
10	Laporan Data Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2024	memuat jumlah data kasus kekerasan perempuan dan anak	PPHAP	Tahun 2024	Dokumen	Selama Berlaku	website
11	Pemutakhiran Keluarga (PK23)	Pemutakhiran PK23 adalah kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi & mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga Indonesia.	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	1 Juli s.d 31 Agustus 2023	Papan Baliho & Spanduk	2 bulan	Media Cetak
12	Iklan Media Konseling Informasi Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	Iklan Media KIE tentang Program Bangga Kencana dipublikasikan agar masyarakat disemua kalangan umur mengetahui tentang program Bangga Kencana	Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan	16 Maret s.d 16 Agustus 2023	Penayangan Iklan Televisi	6 bulan	Media Elektronik
13	Iklan Media Konseling Informasi Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana	Iklan Media KIE tentang Program Bangga Kencana dipublikasikan agar masyarakat disemua kalangan umur mengetahui tentang program Bangga Kencana	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	16 Maret s.d 16 Agustus 2023	Penayangan Iklan Radio	6 bulan	Media Elektronik
14	Pengadaan Cetak Poster & Leaflet	Melalui Poster & Leaflet dapat disebar luaskan kepada masyarakat secara langsung yang berisi pesan- pesan penting diantaranya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Penggunaan Aplikasi Elisimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUF), dan Stunting	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	16 Maret s.d 31 Desember 2023	Cetak Poster & Leaflet	10 bulan	Media Cetak

15	Kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam)	Melalui Rakorcam dengan sasaran Lintas Sektor & Mitra kerja dalam menginformasikan tentang keberhasilan program Bangga Kencana khususnya dan program lainnya yang berintegrasi dengan program lainnya yang ada di kecamatan	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	1 Tahun Sekali setiap Kecamatan	Rapat Koordinasi Tk. Kecamatan	1 bulan	Media Sosial
16	Kegiatan Mini Loka Karya (Minilok) Kecamatan	Minilok Kecamatan yang diinisiasi oleh Ketua TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Tk. Kecamatan dengan sasaran anggota TPPS Desa/Kelurahan diharapkan dapat mengatasi permasalahan Stunting dari pendampingan sampai dengan penanganannya.	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	10 Kali setiap Kecamatan	Rapat - Rapat	1 Tahun	Media Sosial
17	Pelayanan KB	Dalam Rangka Memperingati Ulang Tahun IBI	Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Ketahanan Keluarga	5 Hari (5-12 Juni)	Dokumentasi (Foto)	5 Hari	
18	Siladu (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu)	Layanan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Bidang Pemenuhan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan	Setiap Ada Pelaporan	Aplikasi	Saat ini	Media Masa
19	Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Layanan Konsultasi Bagi Masyarakat	Bidang Pemenuhan Perlindungan Hak Anak dan Perempuan	Setiap Ada Pelaporan	Aplikasi	Saat ini	Media Elektronik
20	Pelayanan PUSPAGA	Untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dalam Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak dengan menyediakan layanan yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi sebagai One Stop Service/Layanan Satu Pintu Keluarga.Holistik Integratif Berbasis Hak Anak" Yaitu meningkatkan kemampuan keluarga, meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan,keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak,termasuk perlindungan dari kekerasan,eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.	BIDANG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Brosur	1 Tahun	Media Sosial

B. INFORMASI SERTA MERTA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai dan Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan /Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1							
2							

C. C. INFORMASI SETIAP SAAT

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang Menguasai dan Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan /Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	SK PPID	Nama dan jabatan	Bidang Sekertariat	2025	Dokumen	Selama Berlaku	website
2	MOU	surat perjanjian DP3AP2KB dengan BAZNAZ tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak	PPHAP	2019	Dokumen	Selama Berlaku	webiste
3	MOU	Surat Perjanian DP3AP2KB dengan Kaltim Post Cabang Penajam tentang Kabupaten Layak Anak	PPHAP	2019	Dokumen	Selama Berlaku	website
4	RENSTRA	Rencana strategis DDP3AP2KB	Bidang Sekretariat	2024	Dokumen	Selama Berlaku	website
5	RENJA	Rencana Kerja DDP3AP2KB	Bidang Sekretariat	2025	Dokumen	Selama Berlaku	website
6	Agenda Kerja Pimpinan Satuan Kerja	memuat informasi agenda kerja pimpinan DP3AP2KB yang akan diupdate setiap bulan	Bidang Sekretariat	2025	Dokumen	Selama Berlaku	website

Mengetahui
Atasan PPID Pelaksana
Kepala Dinas

Chairur Rozikin, S.Sos, MM
NIP. 19700407 199203 1 005